



BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Nomor: 27 / Kcp. KDH / 1990.

Tentang:

PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN TAHUN 1989/1990 DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

Menimbang : a. bahwa intensifikasi pertanian merupakan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas usaha yang berdasarkan Keputusan Menteri - Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 06/SK/Mentan/Bimas/XI/1988 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta/Ketua Satuan Pembina Bimas Nomor: 158/KPTS/1989 perlu dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas agar dapat berjalan dengan baik dan sukses perlu segera ditetapkan Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990 di Kabupaten - Daerah Tingkat II Sleman yang diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor: 38 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1964 ;  
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 ;  
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 09/SK/Mentan/Bimas/VII/1984 ;  
6. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 06/SK/Mentan/Bimas/XI/1988 ;  
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 158/KPTS/1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990 di Kabupaten - Daerah Tingkat II Sleman terdiri dari :  
a. Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran.  
b. Intensifikasi Tebu Rakyat ( TRI ).  
c. Intensifikasi Ayam Bukan Ras ( INTAB ).

KEDUA : Ketentuan Pokok Penyelenggara Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Ketentuan tentang koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan program Intensifikasi Pertanian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ini diatur dalam Petunjuk Operasional dari Menteri Muda Pertanian.
- KEEMPAT : Tata cara dan Tata Laksana tugas fungsional bagi masing-masing Instansi anggota Satuan Pelaksana Bimas diatur dan ditetapkan dalam bentuk :
- Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis dari Direktur Jenderal Pertanian Pangan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan.
  - Surat Edaran/Petunjuk Perkreditan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Expor Impor Indonesia dan pelaksana lainnya.
  - Petunjuk dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi dan Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi.
  - Petunjuk dari Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
  - Petunjuk dari Instansi terkait dalam pelaksanaan Program - Intensifikasi Pertanian.
- SELIMA : Tanggung jawab Pembinaan Intensifikasi sebagaimana dimaksud - diktum PERTAMA ini di Tingkat Kecamatan berada pada Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan di Tingkat Desa berada pada Kepala Desa selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Desa.
- ENAM : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman .  
Pada tanggal : 1 - 2 - 1990 .



Salinan Keputusan ini dikirim kepada:

- Yth. Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- Sdr. Ka.Kan.Wil.Departemen Pertanian Propinsi DIY.
- Sdr. Sekretaris Satuan Pembina Bimas DIY.
- Sdr. ....

5. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Pangan Prop.DIY.
  6. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi DIY.
  7. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Propinsi DIY.
  8. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
  9. Sdr. Kepala Itwilcab Daerah Tingkat II Sleman.
  10. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat III Sleman.
  11. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
  12. Sdr. Kepala BRI Cabang Sleman.
  13. Sdr. Ka.Kan.Dep. Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
-

NOMOR: 27 /Kep. KOH/1990.

## Tentang

Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990  
di Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman

Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1989/1990.

## B A B I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

## Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Intensifikasi Pertanian adalah upaya peningkatan produktivitas usaha tani dengan penerapan Sapta Usaha untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, dengan mencakup beberapa komoditi yang dikelola melalui wajah/organisasi Bimas.
- b. Supra Insus adalah kerjasama penyelenggaraan intensifikasi usahatani kelompok tani pelaksana insus dalam WKPP untuk menerapkan pola tanam yang menjamin terwujudnya keserempakan panen dan keragaman varietas. Unit terkecil Supra Insus adalah kelompoktani dan satu kesatuan operasional penyelenggaraan supra insus mencakup areal ± 15.000 Ha.
- c. Tebu Rakyat Intensifikasi ( TRI ) adalah tanaman tebu rakyat yang dilaksanakan dalam usaha peningkatan produktivitas dalam menghasilkan tebu maupun gula per kesatuan luas dengan penerapan teknologi anjuran.
- d. Intensifikasi Ayam Buras ( INTAB ) adalah pemeliharaan ayam bukan ras ( kampung ) yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktivitasnya dengan usaha pokok menekan angka kematian melalui teknologi yang dianjurkan.

## Pasal 2

## Pokok-Pokok Kebijaksanaan

- (1) Usaha pokok Intensifikasi Pertanian dilaksanakan di semua lahan usahatani, - baik sawah, lahan kering, pekarangan, lahan baru hasil perluasan ( pencetakan sawah ), lahan rehabilitasi yang memungkinkan diterapkan rekomendasi Sapta - Usaha Intensifikasi baik lengkap maupun partial.
- (2) Intensifikasi Pertanian dilakukan secara terpadu, mencakup semua komoditi, - baik secara monokultur, polykultur, tumpangsari, tumpang gilir, tanaman sela maupun usaha pengendalian lingkungan hidup ayam buras.
- (3) Mutu intensifikasi yang ditingkatkan melalui penerapan teknologi hemat lahan untuk mencapai produktivitas tinggi perlu didukung :
  - a. Penyatuan pola usahatani, pola tanam, tata tanam dalam mengembangkan berbagai komoditi untuk meningkatkan pendapatan petani dan partisipasi daerah.
  - b. Bimbingan intensifikasi pertanian yang dikelola Bimas baik yang swadana - maupun kredit dapat mewujudkan keterkaitan fungsional dengan program lain dalam optimasi pemanfaatan sumber daya usahatani.

- (4) Dalam peningkatan mutu intensifikasi ditetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan sebagai berikut :
- Supra Insus dilaksanakan pada daerah terpilih dan potensial bagi tercapainya tingkat produktivitas yang tinggi pada tanaman padi dan lainnya dalam pola tanam setahun.
  - Bimbingan meningkatkan intensifikasi khusus dilaksanakan secara sistimatik dan berencana melalui peningkatan kemampuan kelompoktani dalam penguasaan sepuluh jurus kemampuan kelompoktani tanpa mengabaikan bimbingan kepada Petani Innum.
  - TRI diselenggarakan di wilayah kerja Pabrik Gula Madukismo dengan melaksanakan secara konsisten pola tanam, tata tanam serta sistem glebagan.
  - Pemantapan swasembada pangan terkait peningkatan gizi masyarakat dengan penyelenggaraan program INTAB pada kelompoktani dengan menyerap teknologi tepat guna.
  - Petani program intensifikasi dapat memanfaatkan fasilitas kredit atau swadana dengan memanfaatkan berbagai proyek dan bantuan seperti Banpres, pengadaan vaksin ND.
- (5) Perlu dilaksanakan operasi khusus melalui pendekatan dalam mengatasi hambatan di suatu daerah dalam pelaksanaan Supra Insus serta peningkatan mutu TRI.
- (6) Untuk merangsang kegairahan petani berpartisipasi melaksanakan Supra Insus, Intensifikasi Khusus, mengembangkan dinamika kelompoktani, dengan menyelenggarakan Lomba Supra Insus, Insus Pola Tanam, Lomba TRI, INTAB, Penyuluhan Kelompoktani dengan pemberian berbagai bentuk penghargaan.
- (7) Pertanaman TRI dilaksanakan di sawah dengan sistem lubang (Reynoso) dan lahan kering dengan sistem penanaman lahan kering.
- (8) Teknologi yang dianjurkan adalah paket Sapta Usaha sebagai berikut :
- Pemakaian bibit dari KBD dengan jenis unggul.
  - Penggarapan sawah dengan sistem Reynoso dan lahan kering dengan penanaman lahan kering di tanaman ke dua dengan sistem keprasan.
  - Penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman.
  - Pemeliharaan dan perlindungan tanaman dari gulma, hama dan penyakit.
  - Pengaturan air sesuai anjuran.
  - Penebangan dan pengangkutan yang menjamin tebu layak giling diterima oleh Pabrik Gula.
  - Pengolahan hasil efisien.
- (9) TRI lahan sawah tanaman pertama disebut TRI I dan tanaman kedua (keprasan pertama) disebut TRIS II, TRI lahan tegalan tanaman pertama disebut TRIT I, tanaman kedua (keprasan pertama) disebut TRIT II dan tanaman ketiga (keprasan kedua) disebut TRIT III.
- (10) Berdasarkan kemampuan petani TRI tanpa mengabaikan penerapan teknologi dapat melakukan pinjaman untuk :

- a. Menggunakan paket kredit secara lengkap.
  - b. Menggunakan sebagian dari paket kredit.
  - c. Tidak menggunakan paket kredit.
- (11) Berdasarkan ketentuan tersebut ayat (10) di atas, maka jenis TRI adalah :
- a. TRIS I dengan menggunakan fasilitas kredit adalah TRIS I-K.  
TRIS I tidak menggunakan fasilitas kredit adalah TRIS I-N.
  - b. TRIT I dengan menggunakan fasilitas kredit adalah TRIT I-K.  
TRIT I tidak menggunakan fasilitas kredit adalah TRIT I-N.
  - c. Bagi tanaman kedus dan ketiga disingkat dengan cara seperti pada butir 2  
(a) dan (b) ayat ini dengan membedakan tingkat pertamanya sesuai ayat (1)  
pasal ini.
- (12) Lokasi pertanaman TRI ditetapkan di daerah Kecamatan terinci per Desa, dengan luas sesuai dengan kapasitas pabrik dan lamanya masa giling.
- (13) Wilayah Pabrik Gula merupakan kesatuan operasional yang meliputi :
- a. Lahan sekitar dan relatif dekat dengan Pabrik Gula.
  - b. Pengaturan pola dan tata tanam untuk memperoleh rendemen optimum dalam menuhi gilingan tebang.
  - c. Pengaturan giling tebang sesuai dengan masa giling optimum Pabrik Gula.
- (14) Tanaman sawah dilaksanakan glebagan secepat-cepatnya 3 (tiga) tahun dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sekali terinci dalam jadwal alih tanam.
- (15) Tanaman kedua lahan sawah dibatasi pada areal tanam yang ditebang sampai pertengahan masa giling pada wilayah Pabrik Gula.
- (16) Penanaman lahan tegalan dilaksanakan awal musim hujan, tanaman kedua dan ketiga dilahan tegalan dibatasi pada persyaratan teknis dan ekonomis.
- (17) Mengatur tanggung jawab Pabrik Gula atas wilayah kerjanya, Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas menetapkan pertanaman tebu untuk setiap musim tanam pada Pabrik Gula Madukismo dapat diselesaikan giling maksimal 150 hari giling.
- (18) Petani peserta TRI adalah :
- a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik sendiri.
  - b. Pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman tebu.
  - c. Penggarap yang diberi kuasa pemilik tanah untuk tanaman tebu dan disahkan oleh Kepala Desa dengan ketentuan tanah garapan termasuk tanahnya sendiri tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- (19) Petani peserta TRI disalurkan dalam wadah kelompoktani hamparan.
- (20) Perorangan, sekelompok orang, petugas negara dan Badan Usaha yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik orang lain dengan sistem sewa tidak diperkenankan menjadi peserta TRI.
- (21) Areal TRI sawah dan tegalan baik yang kredit maupun swadana, hasil tebu gilingnya merupakan tebu giling bagi Pabrik Gula Pembimbing.

(22) Semua tebu milik pabrik gula yang terdiri dari :

- Tebu yang ditanam diatas tanah hak guna usaha.
- Tebu yang ditanam atas perjanjian kerja dengan Badan/Lembaga sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian dilaksanakan diatas tanah milik negara.
- Tebu yang ditanam sebagai percobaan/penelitian menjadi tebu giling Pabrik Gula yang mewilayahi lokasi pertanaman tebu tersebut.

#### Pasal 3

##### Lingkup Kegiatan

(1) Intensifikasi Pertanian tahun 1989/1990 meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan penyuluhan dan pelayanan kepada kelompoktani sehingga mampu menerapkan sapta usaha secara penuh.
- Penetapan tertib pola tanam.
- Penyelenggaraan Kebun Benih (perjenis, dasar, pokok dan sebar) baik padi, palawija, sayuran, tebu untuk pertanaman musim berikutnya.
- Pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan kredit.
- Penanganan budi daya komoditi program Bimas.
- Pembinaan dan penyebarluasan teknologi produksi.
- Pasca Panen dan pemasaran.

(2) Kegiatan pada ayat (1) butir c, f, g meliputi kegiatan :

- Pelaksanaan vaksinasi ND untuk memperkecil kematian.
- Penyediaan kandang, termasuk teknologi yang dianjurkan pada sapta usaha - ayam Buras.
- Pembinaan pemeliharaan ayam buras yang lebih intensif.
- Penanganan pasca panen yang intensif sesuai dengan teknologi yang dianjurkan Dinas Peternakan Kabupaten Sleman.

#### Pasal 4

##### Peserta

(1) Petani diberi kesempatan untuk melaksanakan intensifikasi dalam meningkatkan produktivitas usahatani secara perorangan, kelompoktani, maupun kerjasama - perusahaan Pembimbing dengan monokultur, tumpangsari, tumpang gilir, tanaman sela maupun pola lainnya.

(2) Peserta TRI, baik perorangan, sekelompok orang, petugas negara, Badan Usaha tidak diperkenankan mengusahakan tanaman tebu pada milik orang lain dengan sistem sewa.

(3) Peserta INTAB adalah masyarakat pedesaan yang memiliki ayam Buras dan bersedia menerapkan teknologi serta berhimpun dalam kelompoktani dengan syarat minimal:

- Telah mengandangkan ayamnya.
- Melakukan vaksinasi minimal 2 kali dalam satu tahun.

## B A B II

## S A S A R A N

## Pasal 5

## Pendapatan dari Produksi

- (1) Sasaran pendapatan petani dari usahatani terpadu luas 1 (satu) hektar dalam tahun 1989/1990 diupayakan sekurang-kurangnya sampai sebesar Rp.1.500.000,-/ tahun.
- (2) Untuk melestarikan swasembada beras, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani sasaran intensifikasi tahun 1989/1990 adalah :
- Produksi padi tahun 1989 : 289.664 ton gabah kering giling dengan produktivitas untuk Supra Insus paling rendah 7,2 ton dan Insus 5,5 ton gabah kering giling per hektar.
  - Produksi jagung tahun 1989 : 16.306 ton pipilan kering dengan produktivitas Insus jagung 50 Ku./Ha. biji kering, produksi kedelai tahun 1989 sebesar 3.229 ton dengan produktivitas Insus kedelai sebesar 17 Ku./Ha.
  - Produksi tebu TRI musim tanam 1989/1990 sebesar 191.050 ton atau 15,623 - ton hablur dengan produktivitas hablur untuk TRISUS I 8,25 ton/ha., TRISUS II 7,01 ton/Ha., TRIS I 7,14 ton/Ha., TRIS II 6,56 ton/Ha., dan TRIT I 4,55 ton/Ha., TRIT II 3,85 ton/Ha., TRIT III 3,64 ton/Ha.
  - Produksi ayam Bukan Ras sebesar 112.560 Kg. daging dan 111.153 butir telur.

## Pasal 6

## Volume Intensifikasi

Untuk mencapai sasaran sebagai mana tercantum pada pasal (5) diatas ditetapkan sasaran volume (areal) Intensifikasi sebagai berikut :

- a. Intensifikasi padi sawah seluas 54.500 Ha. terdiri dari :

	MT. 1989	MT. 1989/1990	Jumlah
Padi sawah :	21.200 Ha.	33.300 Ha.	54.500 Ha.
Padi gogo :	- Ha.	- Ha.	- Ha.
J u m l a h :	21.200 Ha.	33.300 Ha.	54.500 Ha.

Perincian sasaran intensifikasi padi tercantum pada Lampiran I.

- b. Intensifikasi palawija seluas: 14.735 Ha. terdiri dari :

	MT. 1989	MT. 1989/1990	Jumlah
Jagung :	2.190 Ha.	2.610 Ha.	4.800 Ha.
Kedelai :	1.150 Ha.	300 Ha.	1.450 Ha.
Kc. Tanah :	4.250 Ha.	500 Ha.	4.750 Ha.
Ubi kayu :	1.995 Ha.	1.040 Ha.	3.035 Ha.
Ubi jalar :	550 Ha.	150 Ha.	700 Ha.
Kc. Hijau :	- Ha.	- Ha.	- Ha.
Sorghum :	- Ha.	- Ha.	- Ha.
J u m l a h :	10.135 Ha.	4.600 Ha.	14.735 Ha.

Rincian sasaran intensifikasi sayuran tercantum pada Lampiran II.

c. Intensifikasi Sayuran seluas: 1.865 Ha. terdiri dari :

	MT.1989	MT.1989/1990	Jumlah
Bawang Putih	50 Ha.	50 Ha.	100 Ha.
Bawang Merah	- Ha.	- Ha.	- Ha.
Lombok	265 Ha.	105 Ha.	370 Ha.
Kentang	40 Ha.	35 Ha.	75 Ha.
Kobis	100 Ha.	35 Ha.	135 Ha.
Petsai/Sawi	65 Ha.	20 Ha.	85 Ha.
Tomat	135 Ha.	80 Ha.	215 Ha.
Sayuran Lain	685 Ha.	200 Ha.	885 Ha.
Jumlah	1.340 Ha.	525 Ha.	1.865 Ha.

Rincian sasaran intensifikasi sayuran tercantum pada Lampiran V.

d. Rincian sasaran butir (a) termasuk didalamnya sasaran Supra Insus padi pada MT.1989 seluas: 6.000 Ha. dan MT.1989/1990 seluas: 15.000 Ha.

e. Lahan TRI di Wilayah Daerah Tingkat II Sleman Musim Tanam Tahun 1989/1990 :

TRIS I	:	- Ha.
TRIS II	:	150 Ha.
TRIT I	:	825 Ha.
TRIT II	:	500 Ha.
TRIT III	:	750 Ha.
KBD	:	- Ha.
TRISUS I	:	625 Ha.
TRISUS II	:	150 Ha.
KBI	:	- Ha.
KBN	:	- Ha.

Jumlah : 3.000 Ha.

f. Untuk INTAB sasaran populasi awal sebesar 46.900 ekor dan populasi akhir : 84.420 ekor dengan kebutuhan vaksin sebesar: 234.500 strain K dan 234.500 strain P.

Rincian masing-masing Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

### B A B      III

#### PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

##### Pasal 7

###### Pola Usaha Tani dan Konservasi

- (1) Pengaturan pola usahatani, pola dan tata tanam diarahkan kepada komoditi yang sesuai dengan pengembangan wilayah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani maksimum dan memperhatikan pelestarian sumberdaya.
- (2) Intensifikasi pertanian di lahan yang terancam bahaya erosi perlu dilaksanakan dengan memerlukan kaidah usaha tani konservasi.
- (3) Program TRI dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan menetapkan areal dan harus mendapat jaminan dari Pemerintah Desa mengenai: Keamanan tebu, target - areal dan lain-lainnya.

## Pasal 8

## Pengairan

- (1) Seluruh sawah yang terjamin penyediaan airnya, baik irigasi maupun tada hujan dan lainnya pada musim hujan harus semaksimal mungkin untuk intensifikasi tanaman pangan dan tebu.
- (2) Pengairan bagi tanaman padi, palawija, khususnya pada musim kemarau maka panitia pengairan perlu mengatur jadwal giliran pembagian air berdasarkan pola tanam yang ditetapkan.
- (3) Pengairan program TRI dan tanaman lainnya perlu dimusyawarahkan Panitia Pengairan dengan mengikuti-sertakan OPPA, untuk mendukung pengelolaan air, pelestarian pengairan, efisiensi ditingkat jaringan dan menghindari rusaknya jaringan selama penanaman, penebangan dan pengangkutan tebu.
- (4) Panitia Pengairan bersama Fabrik Gula dan Satuan Pelaksana Bimas mengambil langkah untuk mengatasi masalah bencana kekeringan/kebanjiran yang dialami peserta TRI.
- (5) Dalam pelaksanaan tersebut ayat (4) pasal ini petani turut menanggung biaya tertentu, yang besarnya ditentukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten setelah dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG).
- (6) Pengelolaan tanaman tebu dilaksanakan sesuai syarat-syarat dan sistem pengairan yang ada di wilayahnya.
- (7) Perluasan tebu di lahan kering apabila keadaan air tanah atau sungai setempat memungkinkan Fabrik Gula Madukismo untuk mengembangkan sistem pengairan yang memanfaatkan air tanah yang dalamnya lebih 100 meter harus mendapat persetujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktorat Geologi.

## Pasal 9

## Benih dan Bibit

- (1) Petani pelaksana intensifikasi, terutama Supra Insus, Intensifikasi Khusus baik padi, palawija, sayuran, tebu wajib menanam varietas unggul bermutu yang dianggap Instansi berwenang.
- (2) Dalam mencukupi kebutuhan benih bermutu, pada setiap musim tanam diupayakan pengembangan benih oleh Kelompoktani yang bekerjasama dengan Perum Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PUSKUD, Perusahaan Pembimbing atau penyalur benih yang diawasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau Instansi lain yang berwenang.
- (3) Upaya meningkatkan mutu intensifikasi padi untuk memperoleh hasil per hektar dan mutu gabah lebih tinggi, penggunaan padi diajarkan kepada :
  - a. Penggunaan varietas yang dilepas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Peningkatan dan perluasan penanaman varietas unggul bersertifikat, pada areal yang cocok bagi pertumbuhannya.
  - c. Pengembangan varietas di daerah diajarkan kepada varietas yang beragam dengan memperhatikan keadaan serangan wereng batang coklat dan tungro.
  - d. Perluasan varietas unggul untuk dataran tinggi (sampai 1.200 dari permukaan laut) serta varietas unggul untuk padi gogo dengan memperhatikan ketahanan terhadap hama dan penyakit.
  - e. Penanaman varietas .....

- e. Penanaman Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) bagi daerah serangan, bahaya dan ancaman di dataran rendah maupun dataran tinggi dan daerah serangan tungro dihindarkan dengan cara pananaman varietas yang rentan terhadap serangan wereng hijau dan tungro.
  - f. Daerah penanaman monokultur padi, dianjurkan melakukan rotasi varietas atas kelompok tetua dengan pola tanam/pergiliran varietas berpedoman pada petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan.
  - g. Pengurangan butir hijau dan mengapur di daerah berpengairan dilakukan :
    - Penanaman bulan Oktober dan November menggunakan varietas berumur dalam: IR.48 .....
    - Penanaman bulan Desember, Januari menggunakan varietas berumur genjah: - IR.36 dan Cisadane.
    - Penanaman bulan Februari dan Maret menggunakan varietas genjah: IR.36, - Citanduy.
- (4) Petani pelaksana Insus padi wajib menanam varietas unggul Nasional yang dianjurkan Satuan Pelaksana Bimas dengan menyeragamkan waktu tanam pada wilayah - Kelompoktani.
- (5) Penanaman padi sawah dilakukan paling banyak 2 kali dalam setahun dengan digilir tanaman palawija atau tanaman sayuran.
- (6) Peningkatan intensifikasi palawija/sayuran dilaksanakan dengan cara penggunaan benih unggul berkaitu, sesuai varietas yang dianjurkan.
- (7) Penyaluran benih jagung Hibrida dilakukan oleh penyalur PT. Pertani.
- (8) Pembinaan produksi dan pemasaran benih merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan DIY.
- (9) Memungjang benih unggul berkaitu, padi, palawija, sayuran dilakukan pembinaan - intensif terhadap sumber pengadaan dan penyaluran benih sampai Wilayah Kerja Penyaluhan Pertanian (WKPP).
- (10) Pabrik Gula Madukismo bertanggung jawab terhadap pengadaan, penyediaan dan - penyaluran bibit dengan Enam Tepat yaitu: Tepat Jenis, Mutu, Jumlah, Waktu, - Tempat dan Harga dengan menggunakan KEP, KBN dan KHD.
- (11) Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas menyediakan lahan untuk kebutuhan bibit seperti ayat (10).
- (12) Penggunaan lahan untuk ketan bibit dilakukan berdasarkan perjanjian kerja antara Pabrik Gula Madukismo dan petani dengan ketentuan :
- Pemilik lahan memperoleh :  

$$11/16 \times 25 \% \times \text{hasil gula rata-rata TRIS I sekurang-kurangnya } 25 \text{ kuintal gula tiap Ha.}$$
  - Angka rata-rata gula TRIS I adalah dari Desa KBD diselenggarakan, kalau di Desa TRIS I tidak ada, maka menggunakan rata-rata TRIS I di Desa terdekat.
  - Pembayaran dilakukan dalam bentuk uang sesuai dengan harga prevenue saat - penyerahan tanah.
- (13) Bibit tebu TRI harus menggunakan bibit dari KBD kecuali memenuhi persyaratan menggunakan bibit pucuk dari generasi pertama maksimal 30 %.
- (14) Penggunaan bibit pucuk menggunakan rekomendasi dari Dinas Perkebunan DIY.
- (15) Harga bibit .....

- (15) Harga bibit KBD ditentukan dengan pedoman paket tertib, bibit stek pucuk harganya ditentukan oleh Bupati/Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (16) Pabrik Gula Madukismo bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas bibit yang disalurkan kepada petani TRI.
- (17) Pengawasan mutu bibit dilakukan Dinas Perkebunan DIY bekerjasama PGGI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia) dan Dinas Perkebunan dapat melarang penyaluran bibit kepada petani TRI.
- (18) Pengawasan penyaluran bibit ke petani oleh Satuan Pelaksana Bimas sesuai dengan Wilayah Kerjanya.

#### Pasal 10

- (1) Usaha peningkatan produktivitas ayam Buras dilakukan dengan :
  - a. Peningkatan mutu bibit ayam Buras dengan seleksi, sehingga dapat dipelihara selama produktivitasnya masih menguntungkan.
  - b. Agar pertumbuhan dan produksi ayam Buras meningkat dianjurkan pemberian makanan tambahan dengan penyedianya dilakukan oleh petani.
  - c. Mengurangi kematian penyakit tetelo (ND) dilakukan dengan vaksinasi dilakukan berkelompok dibimbing Petugas Peternakan (PPL).
  - d. Pengadaan dan penyedian vaksin :
    1. Swadana dari petani/kelempoktani.
    2. Subsidi dari Dinas Peternakan DIY (APBN, APBD), Banpres.
  - e. Mengurangi kematian ayam Buras dan mempermudah pengelolaannya perlu dibuat kandang.
  - f. Pengembangan dan peningkatan pemilikan, dianjurkan penetasan telur secara berencana dan untuk peningkatan produksi diusahakan keseimbangan populasi ayam jantan dan betina.
- (2) Pengawasan ketetapan jenis, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu pengadaan bibit dilakukan Dinas-Dinas dalam Lingkup Kan.Wil.Dep.Tan.DIY.

#### Pasal 11

##### Sarana Produksi

- (1) Kebutuhan pupuk, pestisida, pakan, vaksin pada musim tanam 1988/1989 adalah sebagai berikut :
 

Rencana kebutuhan pupuk MT.1988 dan MT.1989/1990 untuk Intensifikasi dan non Intensifikasi Tanaman Pangan dan Komoditi lain tercantum dalam Lampiran: VIII.
- (2) Rencana definitif jumlah dan jadwal bantuan kebutuhan pupuk dan pestisida pada masing-masing daerah berpedoman pada rencana kebutuhan.
- (3) Pengadaan, penyaluran pupuk, pestisida, vaksin, Zat Pengatur Tumbuh/Pupuk Pengelak Cair dan parasit hama diatur sebagai berikut :
  - a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai Lin IV menjadi tanggung-jawab PT. PUSRI.
  - b. Pengadaan dan penyaluran pestisida sampai Lin IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI.
  - c. Pengadaan Pupuk .....

- c. Pengadaan pupuk Pelengkap Cair dan Zat Pengatur Tumbuh sampai Lin IV menjadi di tanggung jawab produsen.
  - d. Pengadaan dan penyediaan vaksin bantuan oleh Dinas Peternakan DIY dan vaksin swadana oleh aselir bekerjasama Perusahaan/Produsen.
  - e. Pengadaan parasit hama laboratorium pabrik gula menjadi tanggung jawab Pabrik Gula Muukromo dan penyaluran kepada petani diberikan cuma-cuma.
  - f. Lokasi Lin IV ditetapkan Satpel Bimas Kabupaten atau perusahaan pengelolaan (TKI) setelah memberitahui PT. MUSRI, PT. Pertani dan perusahaan yang ditunjuk.
- (4) Apabila tidak diperoleh pupuk ZA, dapat menggunakan pupuk Urea dengan dosis yang disesuaikan.
- (5) Penyesuaian penggunaan pupuk Urea, didasarkan Ketetapan Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten berdasarkan rekomendasi PGGI.
- (6) Harga pupuk ZA, Urea, KCl, Pestisida untuk TRI adalah sama dengan untuk tanaman pangan.
- (7) Pengawasan dan pelayanan pupuk serta pestisida dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (8) Sarana Produksi untuk TRI, KUD wajib kerjasama dengan pabrik gula dengan kelompoktani TRI serta dibawah bimbingan kerja pabrik gula.
- (9) Pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi dilakukan sesuai SK Menteri Perdagangan Nomor: 1075/Kp/VII/84 dengan prioritas KUD yang terkait selembaganya dengan kelompoktani.
- (10) Satuan Pembina Bimas DIY dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten berkewajiban memantau dan mengendalikan persediaan pupuk dan pestisida di Lin III dan IV (WKPP), demikian untuk penyediaan vaksin.

#### Pasal 12

##### Pengendalian Hama dan Penyakit

- (1) Pengendalian hama/penyakit dilakukan petani perorangan atau kelompok, mendasarkan informasi pengamat hama dan PPL beserta rekomendasi pengendaliannya.
- (2) Melakukan pengiliran varietas antar musim untuk mencegah timbulnya serangan hama/penyakit.
- (3) Apabila timbul eksplosi sehingga petani perorangan maupun kelompok tidak mampu mengatasinya, Pemerintah mengusahakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Brigade Proteksi, atau Instansi lain yang berwenang secara serentak/massal dengan menggunakan Regu Pengendalian Hama dari petani.

#### Pasal 13

##### Panen dan Pasca Panen

- (1) Menekan kehilangan hasil tanaman pangan maka panen dilaksanakan dengan sabit bergerigi, perontok dengan power & Thresher, pedhal Thresher, banting berkelambu.
- (2) Pengadaan sarana pasca panen disediakan fasilitas kredit yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor: 11 Tahun 1981 berikut petunjuk dan tata cara pelaksanaannya.

(3) Petani yang .....

- (3) Petani yang memerlukan sarana penanganan lepas panen thresher/pedal thresher , alat pembersih (blower) dan alat pengering dianjurkan membeli secara berkelompok atas dasar musyawarah anggota.
- (4) Kegiatan penebangan, pengangkutan, pengolahan, bagi hasil dan pemasaran gula - tahun giling 1989, diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan secara intensif dan pabrik gula melaksanakan perkiraan produksi pada bulan Maret 1989.
- (5) Berdasarkan perkiraan produksi tersebut ayat (4) pasal ini, Forum Musyawarah - Produksi Gula merumuskan rencana tebang, pengangkutan dan pengolahan/giling - tebu.
- (6) Penentuan luas dan waktu tebang, pengangkutan sampai penimbangan di Pabrik Gula dilakukan musyawarah pabrik gula dengan Forum Musyawarah Produksi Gula setiap 2 (dua) minggu sekali.
- (7) Penetapan waktu tebang ditentukan hasil analisa pemasakan tebu dari hamparan - TRI, serta kapasitas giling pabrik gula dan pabrik gula berkewajiban memberitahu ke kelompok tani mengenai jadwal tebang.
- (8) Perubahan jadwal tebang dapat dilakukan apabila terjadi kerusakan mesin, bencana alam, serangan hama/penyakit atau sebab lain yang sulit diatasi dengan dimungkinkan serta diberitahukan pada Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (9) Agar tebangan sampai ditimbang Pabrik Gula sesuai jadwal dengan mutu/kebersihan tebu giling maka pabrik gula mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas penebangan dan pengangkutan tebu.
- (10) Penebangan dan pengangkutan tebu dari lapangan/kebum sampai penimbangan pabrik gula dapat dilakukan petani sendiri, kelompok tani, KUD.
- (11) Biaya tebang dan pengangkutan sampai penimbangan di Pabrik Gula Madukismo termasuk biaya pengambilan contoh tebu, analisa kemasakan menjadi tanggungan petani. Apabila rembangan dan pengangkutan dilakukan kelompok tani/KUD, maka Pabrik Gula wajib membantu peralatan dan fasilitas dengan tarif yang wajar.
- (12) Pabrik Gula wajib memberitahu kepada Kelompoktani TRI serta KUD jumlah hasil - tebu yang diperoleh setelah tebu ditimbang.
- (13) Kelompoktani, KUD dan petugas Satuan Pembina Bimas DIY berkewajiban menyaksikan penimbangan tebu dan sebelumnya digunakan alat timbangan perlu ditera oleh Instansi yang berwenang.
- (14) Hasil ayam Brrias berupa daging/telur dilaksanakan sesuai dengan teknologi pasca panen yang dianjurkan Dinas Peternakan DIY.

#### Pasal 14

##### Pemasaran

- (1) Untuk menjamin distribusi gula, semua gula yang dihasilkan pabrik gula dikuasai pemerintah, dalam hal ini gula bagian petani dibeli Bulog kecuali bagian petani yang diberikan dalam bentuk natura.
- (2) Untuk menjamin mutu gula, semua gula pabrik gula termasuk bagian harus dikemas dalam karung goni/plastik jenis yang baik (sekurang-kurangnya B Twill) dan baru, harga karung ditetapkan Menteri Keuangan.
- (3) Pasaran tebu hasil TRI diatur Menteri Pertanian.

(4) Agar usaha tani .....

- (4) Agar usaha tani ayam Brrias dapat mencapai keuntungan maksimal, pemasarannya dilakukan secara berkelompok melalui KUD atau lembaga swasta lainnya dengan memperhatikan informasi pasar.

## BAB IV

### DUKUNGAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 15

##### Perkreditan

- (1) Petani peserta intensifikasi pertanian 1989/1990 yang membutuhkan modal untuk menerapkan teknologi sesuai rekomendasi, disediakan Kredit Usaha Tani (KUT) - Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan atau Kredit Umum Pedesaan (KUPNEUES).
- (2) Kredit untuk intensifikasi padi dan palawija.
- KUT diberikan BRI Cabang kepada KUD yang ditunjuk apabila KUD belum ditunjuk melalui KUT disalurkan kepada kelompok tani dan setelah satu tahun dilimpahkan ke KUD.
  - Pemunjukan KUD menyalurkan KUT dilakukan Kantor Departemen Koperasi berdasarkan Satuan Pemtina Bimas.
  - Apabila petani melakukan pertanaman tumpang gilir maka KUT tanaman kedua dapat diberikan setelah KUT tanaman pertama dibayar kembali minimal 60 %.
  - Jangka kredit BRI kepada KUD paling lambat (lama) 12 bulan, sedangkan jangka waktu kredit dari KUD kepada petani 1 bulan setelah panen atau paling lama 7 bulan, kecuali ubi kayu 12 bulan.
- (3) Kredit untuk peserta TRT berupa Kredit Usaha Tani (KUT) dan Kredit Modal Kerja (KMK).
- (4) KUT disalurkan kepada petani peserta TRT melalui KUD yang ditunjuk.
- (5) Penetapan KUD ditunjuk dilakukan Bupati/Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana-Bimas Daerah Tingkat II setelah memperhatikan pertimbangan pabrik gula, Kantor Departemen Koperasi dan Kantor Cabang BRI.
- (6) KMK disalurkan kepada kelompok tani peserta TRT dalam keadaan KUD tidak ditunjuk, yang dijamin pabrik gula Madukismo dan pelaksanaannya diatur bersama dengan BRI.
- (7) Pemberian KUT maupun KMK kepada petani dengan ketentuan sebagai berikut :
- Dibuat Perjanjian Kerja antara petani dengan KUD (KUT) dan antara BRI dengan petani/kelompok tani (KMK).
  - Komponen Biaya Beban Hidup (BBH) diberikan dalam bentuk tunai kepada petani TRT.
  - Komponen kredit biaya garapan, pemeliharaan tanaman, tebang angkut diberikan tunai kepada petani TRT (kelompok tani, KUD, Pabrik Gula), berdasarkan Surat Kuasa petani untuk menyelenggarakan garapan, pemeliharaan tebang angkut.
  - Pencairan kredit bibit, pupuk, pestisida, garapan, tebang angkut dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Pabrik Gula Madukismo.

- (6) Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan dalam 5 (lima) tahap sesuai jadwal kebutuhan dengan perhitungan jadwal tanam.
- (9) Paket kredit merupakan paket pedoman, pelaksanaannya disesuaikan oleh Satuan Pelaksana Bimas menurut keadaan dan kebutuhan daerah petani setempat dengan maksimum 25 % paket kredit tiap hektar dan tidak melampaui plafond kredit Kabupaten.
- (10) Kredit penebarantasan hama penyakit dapat dicairkan atas rekomendasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
- (11) Apabila terjadi kelambatan pencairan kredit, atas persetujuan HRI pabrik gula dapat menyediakan uang muka kerja dan akan diperhitungkan setelah kredit dapat dicairkan.
- (12) Kredit penyelenggaraan KBD, KEN, KBI, KBP disediakan oleh Pabrik Gula Madukismo.
- (13) Pembayaran kredit beserta bunga dilakukan melalui KUD (KUT), Pabrik Gula (KGK) saat petani menerima gula yang menjadi haknya dan perhitungan kredit beban petani dihentikan pada saat surat perintah penyerahan barang diterbitkan Pabrik Gula Madukismo.
- (14) Tim pengendali kredit wajib mengusahakan pengembalian kredit TRI tepat waktunya.
- (15) Setelah tutup giling Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten wajib membuat berita acara sebab kredit KUD/Kelompoktani belum lunas.
- (16) Peserta INTAB yang berkeinginan mengembangkan usaha ayam Bruan dapat memanfaatkan KUPHDES, KIK/KMKP.

#### Pasal 16

##### Penyuluhan Pertanian dan Penerangan Bimas

- (1) Penyuluhan program intensifikasi, berpedoman Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 482/KPTS/LP.120/7/1985, Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor: 59 Tahun 1986 dan Nomor: 695/KPTS/LP.120/II/1986. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor: LP.120-47/Mertan/I/1985.
- (2) Penyuluhan Pertanian merupakan penjabaran program intensifikasi massal yang telah dimusyawarahkan petani sehingga merupakan rencana kerja petani.
- (3) Penyuluhan pertanian Sistim LAKU diselenggarakan di tingkat WKPP (Kerjasama - sinder Kebun, UPP) melalui pendekatan kelompoktani dengan metode penyuluhan dan diarahkan terwujudnya Sapta Usaha Intensifikasi.
- (4) Pemimpin formal, informal disertakan untuk mendukung partisipasi petani/kelompoktani guna membuhkan gerakan massal dalam intensifikasi.
- (5) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten melalui berbagai pendekatan/media, menyebarkan informasi, baik kebijaksanaan maupun kemudahan dari pemerintah bagi petani, sehingga merangsang petani untuk memanfaatkan sebaik-baiknya.
- (6) Penyuluhan pertanian LAKU dilakukan kering, diarahkan untuk terwujudnya partisipasi petani melaksanakan intensifikasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah.
- (7) Penerapan teknologi konservasi tanah lahan kering/kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Wilayah dampak unit percontohan pelestarian sumber daya alam (UPSA) merupakan kelipatan bulat wilayah kelompoktani (WILKEL) dan terletak satu WKPP.

- b. Bimbingan intensifikasi pertanian, rehabilitasi dan konservasi tanah, tercantum dalam program penyuluhan pertanian BPP, rencana kerja PPL serta PLP.
- (8) Pedoman terinci penyelenggaraan bimbingan intensifikasi pertanian di lahan kering Daerah Aliran Sungai (DAS), tercantum dalam Surat Keputusan bersama Sekretaris Badan Pengendali Bimas dan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor: 46/Sek/BPB/V/1986 dan Nomor: 035/KPTS/V/1986.
- (9) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten selaku Ketua Tim Kerja FKPP II mengkoordinasikan dan melakukan monitoring mengenai :
- Perencanaan dan pelaksanaan program penyuluhan pertanian di BPP.
  - Gerakan-gerakan massal dalam pelaksanaan program intensifikasi pertanian.
  - Keserasian kegiatan massal serta penanganan hasil pertanian di lapangan.
- (10) Kegiatan penerapan untuk membumuhkan motivasi, pembentukan sikap mental petani dan non petani dalam partisipasi intensifikasi pertanian, peningkatan produksi, perbaikan gizi masyarakat.
- (11) Kegiatan penyuluhan pertanian program TRI diarahkan untuk :
- a. Menumbuhkan motivasi/kesadaran petani untuk peran serta dalam produksi gula.
  - b. Memberi informasi mengenai pengusahaan tebu, penstangan, pengangkutan, pengolahan hasil sehingga masyarakat memiliki pengertian dan membantu sistem glebagan.
- (12) Pada penyuluhan sistem LAKU dilaksanakan dengan :
- a. Alih teknologi budidaya tebu oleh Pabrik Gula, UPP TRI dengan kerjasama dengan kelompoktani.
  - b. Pembinaan dan bimbingan KUD dileakukan oleh Kantor Departemen Koperasi tentang managemen, organisasi dan usaha.
- (13) Hamparan 200 hektar 1 WKPP, diadakan satu kabut paragon/potak demonstrasi di kerjakan petani dengan bimbingan dari Pabrik Gula Madukromo.
- (14) Untuk meningkatkan kegairahan petani TRI, diadakan lomba antara kelompoktani tingkat Kabupaten, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional.

#### Pasal 17

##### Kelompok Tani

- (1) Pembinaan Kelompok Tani hamparan diserahkan terwujudnya kemampuan :
- a. Menerapkan dan menguasai "Sepuluh Jurus Kemampuan Kelompok Tani".
  - b. Melakukan dan mengawasi usahatani, pergiliran tanam setahun.
  - c. Menyusun dan melaksanakan Rencana Definitif Kelompok (RDK).
  - d. Mengusahakan sarana produksi kredit, menggerakkan tabungan kelompok.
  - e. Bekerjasama dengan kelompoktani, KUD, BRI, Perusahaan Pembimbing, Instansi yang mendukung.
- (2) Kelompoktani berperan memperkuat KUD, sehingga petani ikut memiliki dan mengelola dan memberi pelayanan kebutuhan kepada petani.

#### Pasal 18

##### Koperasi Unit Desa (KUD)

- (1) Pembinaan dan Pengembangan KUD dilaksanakan berdasarkan acuan sebagai berikut:
- a. Wilayah kerja KUD kelipatan bulat wilayah kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).
  - b. Ada pengurus KUD membina Unit Pertanian.

- e. Ada Wakil Kontaksi Andalan, menjadi anggota Badan Pembimbing dan Pelindung KUD (BPKUD).
- d. Ada persiapan kontak teni untuk menjadi pengurus KUD.
- e. KUD menjadi tempat pelayanan ekonomi pedasian dan mampu melayani keluarga anggotas.
- (2) KUD diberi kesempatan dalam menyalurkan sarana produksi, kredit, pengolahan dan penampungan hasil.
- (3) Hubungan KUD dengan Kontak Teni, dalam program intensifikasi melalui temu usaha, ajangsauna dan kelompoktani sebagai tempat pelayanan Koperasi (TK).

#### Pasal 19

##### Perusahaan Pembimbing

- (1) Kerjasama Perusahaan Pembimbing dengan kelompoktani untuk memulihkan petani mandiri serta mempunyai kedudukan yang kuat.
- (2) Pelaksanaan Program TRI, perusahaan pembimbing mempunyai tugas :
  - a. Membimbing dan membantu kelompoktani mengenai penyediaan fasilitas kredit,
  - b. Menyusun jadwal tanam dan tebang tebu,
  - c. Pimpinan Kerja Operasional Pelaksanaan Produksi.
  - d. Kerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam program penyuluhan agar petani mau dan mampu melaksanakan Saptu Usaha.
  - e. Menciptakan iklim kelompoktani dan KUD menjadi pasangan kerja serasi dengan perusahaan pembimbing.
  - f. Mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap penebangan, pengangkut dan tebu giling.
  - g. Mengatur, mengurus penyediaan, penggunaan sarana produksi, baik bagi KUD yang ditunjuk maupun yang dilakukan sendiri.
  - h. Menyediakan menyalurkan bibit sampai di Kabupaten pertanian.
  - i. Mengatur mengurus penggunaan kredit TRI, bila kredit tidak disalurkan KUD Pabrik Gula sebagai peminjam kredit TRI.

#### BAB V

##### ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 20

##### Organisasi

- (1) Organisasi Bimas berdasarkan Keppres Nomor: 62 Tahun 1983 berfungsi melakukan koordinasi, integrasi, sinkronasi dalam perencanaan, pengendalian, - pengintensifkan dan pelaksanaan intensifikasi dalam semua tingkat pemerintahan.
- (2) Hubungan dan pembagian tugas berpedoman pada Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: BP.210/155/Kutan/IV/1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi melalui Bimas.

(3) Bupati Kepala .....

- (3) Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Dati II dan Kepala Wilayah Kecamatan, Dosa bertanggung k jawab pelaksanaan program TRI untuk :
- Menyusun pembinaan kelompoktani TRI menjadi pasangan Pabrik Gula Madukis mo.
  - Pembinaan KUD agar mampu melaksanakan pelayanan.
  - Menyusun bahan :
    - Perencanaan kegiatan petugas dan pembinaan kelompoktani.
    - Kegiatan latihan petugas dan kelompoktani.
    - Konsultasi anggota.
    - Program Penyuluhan RPT.
- (4) Organisasi dan Tata Kerja pelaksanaan program TRI diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 13/SK/Mentan/Bimas/XII/1982.
- (5) Pemecahan masalah TRI maka dibentuk Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Dati II yang beranggotakan :
- Wakil peserta TRI sebanyak 2 orang,
  - Wakil KUD, petani wilayah tanam tebu.
  - Wakil Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.
  - Sorang KTPA, Tingkat Kabupaten.
  - Pimpinan RPT yang berada di wilayah Fabrik Gula.
  - Administratur Pabrik Gula sebagai Ketua dan merangkap anggota.
  - Kepala UPP TRI sebagai Sekretaris dan anggota.

#### Pasal 21

##### Tata Kerja

- (1) Menggerakkan, membina, melayani petani intensifikasi berdasarkan Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor: 09/SK/Mentan/Bimas/VII/1984, Surat Sekretaris Badan Pengendali Bimas Nomor: 155/SK/BPB/1/1985 dan Nomor: 61/SK/BPB/VI/1986.
- (2) Kelompoktani TRI merupakan bagian kelompoktani hamparan, diharapkan bersedia mengusahakan tanam tebu sampai siap tebang dan pengelompokan petani TRI minimal 10 Ha.
- (3) Fungsi, peranan kelompoktani, KUD, Pabrik Gula dalam program TRI :
- Kelompoktani,
    - Keanggotaan : Petani TRI, mengusahakan tanaman tebu atau tanaman lainnya sesudah/sebelum tebu.
    - Fungsi : Wadah kerjasama pengelolaan usahateni (TRI) terkait dengan KUD. Pembinaan kelompoktani oleh Pabrik Gula, diarahkan kemampuan menyerap teknologi perkebunan.
    - Peranan : Melaksanakan tanam tebu, menerapkan teknologi kerja dan anggota untuk menunjang masalah yang dihadapi.

## b. KUD .

- Fungsi : Wadah kegiatan ekonomi petani/kelompok tani, menyalurkan dan mengembalikan kredit TRI.
- Peranan : Pendaftaran calon peserta TRI berdasarkan harapan, mengajukan kebutuhan tersebut dan pengawasan penggunaan kredit, pengawasan tebang, angkut, penimbangan, serta penentuan rendemen. Pelayanan sarana produksi (pupuk, pestisida) dan gula tani, bila KUD tidak melayani maka pelayanan dilakukan oleh Pabrik Gula.

## c. Pabrik Gula.

- Fungsi : Perusahaan pengolola adalah tanggung jawab operasional dan pimpinan kerja.
- Peranan : Menyusun rencana, jadwal tanam dan panen. Melakukan bimbingan teknis dalam alih teknologi pertanian bagi petani/kelompok tani. Menciptakan KUD agar mampu melayani sarana produksi dalam progres TRI. Menyediakan dan menyalurkan bibit unggul. Mengurus dan mengatur penyediaan dan penggunaan sarana produksi sesuai teknis. Mengatur, mengurus dan tanggung jawab dalam tebang dan angkut tebu giling.

- (4) Tugas Forum Muayavarah Produksi Gula mengadakan persiapan, pengawasan, persiapan areal, penanaman, tebang/angkut, rendemen, pengolahan, pemacaran.
- (5) Dikemas Kelompok tani ke arah kooperatif dengan ciri-ciri: sebagian besar kegiatan diusahakan secara individual dan kegiatan tertentu oleh pengurus kelompok dan pengurus kelompok sebagai pembimbing kerjasama dengan bimbingan Pabrik Gula/UPT/BPTP/BPT/PPD dan petugas koperasi Kecamatan.

## BAB VI

## PENGOLAHAN HASIL

## Pasal 22

- (1) Petani TRI Wilayah Pabrik Gula Madukromo wajib menyerahkan hasil tebu ke Pabrik Gula Madukromo yang membimbing.
- (2) Petani TRI tidak diperkenankan menyerahkan tebu ke luar wilayah DIY dan Pabrik Gula Madukromo tidak diperbolehkan menerima tebu TRI dari luar wilayahnya.
- (3) Apabila Pabrik Gula Madukromo tidak dapat menampung seluruh hasil TRI, dengan sejauh Satuan Peabina Rimas Propinsi DIY kelebihannya dapat digilingkan ke Pabrik Gula lainnya. Apabila Pabrik Gula Madukromo menggiling tebu selain TRI maka prioritas TRIK, TRIN konduksi tebu lain.
- (4) Penetuan rendemen dalam 2 tahap :
  - a. Tahap pertama rendemen belum terkoreksi, diumumkan sebagai rendemen sementara satu hari setelah tebu digiling.
  - b. Tahap kedua rendemen sudah terkoreksi sebagai rendemen sebenarnya diumumkan pada tanggal 2 dan 17 setiap bulan, yaitu untuk tebu digiling selanjutnya 2 hari sebelumnya.

- (5) Rendemen yang dilakukan Laboratorium Pabrik Gula Madukismo disaksikan oleh Tim Penyakini Rendemen yang dikentuk Satuan Pertina Bisnis DITI atas usul FPTC.
- (6) Perseleksian penentuan rendemen daselesaikan dalam musyawarah FPTC bersama PGSI.

## BAB VII

### RAGU HASIL

#### Pasal 23

- (1) Bagi hasil pengolahan tebu TRI ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri - Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bisnis Nomor: 03/SK/Menteri/Zimas/V/1987.
- (2) Pengagian gula diatur sebagai berikut :
  - a. Rendemen sampai 8 %, petani memperoleh 62 % dan Pabrik Gula Madukismo mendapat 38 % dari gula kristal.
  - b. Rendemen diatas 8 % sampai 10 % bagi hasilnya sama dengan ayat (2) pasal ini, kelebihan hasil diatas 8 Kg. gula untuk setiap Kuintal bagi hasilnya 33 % untuk Pabrik Gula dan 67 % untuk petani.
  - c. Rendemen diatas 10 %, hasil 10 Kg. gula untuk setiap Kuintal tebu sama tersebut ayat (2) b pasal ini, sedangkan kelebihan hasil 10 % gula untuk setiap kuintalnya: 28 % untuk Pabrik Gula Madukismo dan 72 % untuk petani.
- (3) Petani TRI memperoleh 1,5 Kg. totes untuk setiap Kuintal tebu giling, penyebaran bersama penyerahan gula bagian petani dan menurut ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### PERHITUNGAN DAN PEMERINTAHAN HASIL

#### Pasal 24

- (1) Perhitungan bagi hasil dilakukan setiap kelompok kamparan, dilakukan oleh Pabrik Gula yang membimbing dan secepatnya setelah tebu digiling.
- (2) Perhitungan bagi hasil setelah penetapan rendemen tahap pertama, dan bagi hasil definitif setelah penetapan rendemen kedua.
- (3) Daftar bagi hasil tersebut dibuat oleh Pabrik Gula Madukismo dan diserahkan kepada petani/kelompok tani untuk diteruskan kepada BRI.
- (4) Pabrik Gula Madukismo diharuskan membuat Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 2 % gula bagian petani diserahkan kepada petani TRI, dan dibebaskan dari cukai serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - b. 98 % gula bagian petani dijual kepada Pemerintah dengan harga ditetapkan Pemerintah.
- (5) Bagian hasil petani 98 % diberikan BRI melalui KUD penyalur kredit dengan menyerahkan daftar perhitungan dari SPBB yang diterima KUD dari Pabrik Gula diserahkan ke Dolop.

## BAB IX

## KEMERUJUAN PERATURAN

Pasal 25

- (1) Kegiatan operasional intensifikasi pada dasarnya dibayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pengusahaan tebu berupa pengolahan tanah pemeliharaan, tebuung, angkut dan sarana produksi menjadi tanggungan petani.
- (3) Biaya pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknis untuk kepentingan Pabrik Gula Madukromo pengawasannya ditetapkan oleh Satuan Pembina Bimas DIY.
- (4) Pembinaan teknis, program, monitoring, penata usahaan, penyuluhan THT dikenakan DIP Proyek Bimas DIY dan DIP Bimas Perkebunan DIY dan dari dana yang diatur dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Biaya Pembinaan dan bimbingan KUD dikenakan pada Kantor Dinas Koperasi dan UKM DIY.
- (6) Biaya kegiatan kelompoktani, termasuk balas jasa petugas kelompoktani ditanggung oleh kelompoktani, berdasarkan muayyarah anggota kelompoktani dibawah bimbingan dan pengawasan Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan setempat.
- (7) Biaya usahawan INTAM, perbaikan laudong, pemeliharaan, pengadaan sarana produksi dan peralatan menjadi tanggung jawab petani.

## BAB X

## KEMERUJUAN PERATURAN

Pasal 26

- (1) Pedoman yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur komidien.
- (3) Segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali apabila terbukti di komidien tidak terdapat kesaliruan dalam Keputusan ini.

## BAB XI

## KEMERUJUAN PERATURAN

Pasal 27

- (1) Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman :
  - Nomor: 151/Kep.KDH/1987 tentang: Rencana Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran.
  - Nomor: 59/Kep.KDH/1987 tentang: Pelaksana Tebu Banyak Intensifikasi.
  - Nomor: 205/Kep.KDH/1987 tentang: Program Intensifikasi Ayam Purw.

- (2) Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Tingkat Kecamatan segera membuat ketentuan operasional.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku untuk Musim Tahun 1989/1990.

Ditetapkan di : Sleman .

Pada Tanggal : 1 - 2 - 1990.



Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II Sleman

SLEMAN, DIEN. SANIRIN .